

**RESPONS VIETNAM TERHADAP KLAIM SEPULUH GARIS PUTUS-
PUTUS TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN
(STUDI KASUS TAHUN 2019-2024)**

(Skripsi)

Oleh:

**Bintang Widia Sandi Haryawan
NPM. 2016071003**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

RESPONS VIETNAM TERHADAP KLAIM SEPULUH GARIS PUTUS-PUTUS TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN (STUDI KASUS TAHUN 2019-2024)

Oleh

Bintang Widia Sandi Haryawan

Klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menjadi pemicu konflik maritim dengan Vietnam. Apalagi kedua negara sama-sama ingin memperebutkan sejumlah fitur maritim dan potensi kelautan-energi dalam jumlah banyak. Kedua negara saling berkonflik dengan menggunakan persenjataan yang dimiliki menyebabkan kondisi keamanan wilayah menjadi tegang. Tujuan riset ini untuk mendeskripsikan sepuluh garis putus-putus Tiongkok, menjelaskan aksi-aksi Tiongkok dan menganalisis respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Penelitian ini memakai konsep sengketa batas maritim dan sepuluh garis putus-putus. Metode penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni studi dokumentasi yang berasal dari buku, jurnal, situs-situs *website* resmi, dan dokumen. Analisis data dalam penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan respons Vietnam atas klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok yang ilegal di Laut Tiongkok Selatan bertentangan dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus yakni melaksanakan negosiasi, arbitrase, dan kerja sama pertahanan. Namun, usaha-usaha tersebut belum menemukan titik terang sampai saat ini.

Kata Kunci: Konflik maritim, UNCLOS 1982, sepuluh garis putus-putus.

ABSTRACT

VIETNAM'S RESPONSE TO CHINA'S TEN-DASH LINE CLAIM IN THE SOUTH CHINA SEA (CASE STUDY 2019-2024)

By

Bintang Widia Sandi Haryawan

China's ten-dash line claim in the South China Sea has triggered a maritime conflict with Vietnam. Moreover, both countries want to compete for a number of maritime features and marine-energy potential in large quantities. The two countries are in conflict with each other use the weapons that they have to cause regional security conditions to become tense. The purpose of this research is to describe China's ten-dash line, explain China's actions, and analyze Vietnam's response to China's ten-dash line claim in the South China Sea. This research uses the concepts of maritime boundary disputes and the ten dash line. The research method uses a qualitative approach with descriptive research. The data collection technique in the research is a documentation study from books, journals, official websites, and documents. Data analysis in the research starts from data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study explain Vietnam's response to China's illegal ten-dash line claim in the South China Sea which is contrary to International Law of the Sea (UNCLOS 1982). Vietnam's response to the ten-dash line claim is to carry out negotiations, arbitration and defense cooperation. However, these efforts have not found any bright spot until now.

Keywords: Maritime conflict, UNCLOS 1982, ten-dash line.

**RESPONS VIETNAM TERHADAP KLAIM SEPULUH GARIS PUTUS-
PUTUS TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN
(STUDI KASUS TAHUN 2019-2024)**

Oleh:

Bintang Widia Sandi Haryawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : RESPONS VIETNAM TERHADAP KLAIM SEPULUH GARIS PUTUS-PUTUS TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN (STUDI KASUS TAHUN 2019-2024)

Nama Mahasiswa : Bintang Widia Sandi Haryawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016071003

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



(Handwritten signature)

Moh. Nizar, S.IP., M.A.
NIP. 198308192015041005

Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.
NIP. 198807172023212043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

(Handwritten signature)

Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.PA.
NIP. 1981062820050111003

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Moh Nizar, S.IP., M.A.



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.



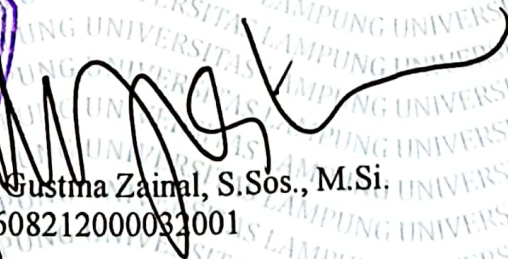
Penguji : Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustma Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000031001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 November 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 21 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Bintang Widia Sandi Haryawan

NPM. 2016071003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 November 2001 sebagai anak pertama dari dua bersaudara yang berasal dari pasangan Moppy Haryawan S.H dan Ibu Siti Katimah S.E. Jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh penulis mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) *Pratama Kids* Bandar Lampung yang diselesaikan di tahun 2008.

Kemudian Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan tahun 2014 di SD Kartika II-5 Bandar Lampung.

Pada tahun 2016, Penulis pernah berpartisipasi dalam Olimpiade Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di tingkat SMP se-Kota Bandar Lampung dan Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselesaikan tahun 2017 di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung. Pada tahun 2019, Penulis pernah berpartisipasi dalam Olimpiade Geografi di tingkat SMA se-Kota Bandar Lampung. Kemudian, Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS AL-AZHAR 3 Bandar Lampung pada tahun 2020. Di tahun tersebut, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

MOTTO

فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبُّكُمْ تُكْذِبَانِ

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Surah AR-Rahman Ayat ke-13)

Love other human beings as you would love yourself.

(Ho Chi Minh, 1st President of Vietnam)

Dengan keyakinan, keuletan, dan keberanian, tidak ada yang tidak berhasil dilakukan di dunia ini.

(Master Cheng Yen, Pendiri Yayasan Tzu Chi)

When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat; instead, they are all the more determined to struggle for a better future.

(Her Majesty Queen Elizabeth II of The United Kingdom)

When you are happy you can forgive a great deal.

(The Lady Diana Spencer, former Princess of Wales)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku, Aiptu Moppy Haryawan, S.H yang selalu memberikan dukungan doa kepada penulis untuk mempercepat penulisan skripsi ini dan selalu taat mengingatkan agar tidak lupa beribadah. Ibuku, Siti Katimah, S.E yang juga mendoakan, mengharapkan, dan meminta penulis agar segera lulus dari bangku perkuliahan dengan baik serta mendapatkan pekerjaan di masa depan yang layak. Terimakasih doa dan jasa kalian semua hingga saat ini penulis mampu melakukan semua hal dengan baik dan bisa melanjutkan perkuliahan hingga selesai.

Terkhusus kepada adikku, Ramadhan Haryawan yang selalu menemani penulis dalam sehari-hari. Terimakasih atas tawa dan dukunganmu selama hidup ini serta Mas Bintang janji akan memberikan kebahagiaan yang layak di masa depan.

Nenekku, Mak in yang selalu mendoakan penulis untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan dan meminta penulis agar patuh terhadap perintah orang tua maupun orang-orang di sekitarnya yang akan berbuah manis kepada diri saya. Kemudian, Eyang Sunar sudah memberikan dukungan selama penulis duduk di bangku perkuliahan untuk cepat menyelesaikan studi dengan baik.

Terimakasih juga kepada Almh. Eyang Uti, Uu Siti Karnah, Nenek Buyut Sumarni, Alm. Opah Siohmpin, Kakek Suryadi, dan para leluhurku yang selalu melihat perjuangan penulis dalam menuliskan skripsi ini dengan baik. Walaupun telah meninggal dunia tetapi kalian semua pernah memberikan nasihat dan doa yang terus-menerus dilakukan sepanjang hidup kalian kepadaku

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Skripsi dengan judul “*Respons Vietnam Terhadap Klaim Sepuluh Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Studi Kasus Tahun 2019-2024)*” merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung.
3. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A. selaku Dosen Pembahas yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam pengerjaan skripsi.
4. Mas Mohammad Nizar, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang terus-menerus mengingatkan penulis agar membuat tulisan yang baik dan menarik dibaca dengan tetap memperhatikan kaidah penulisan ilmiah yang baik.
5. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang menyemangati penulis untuk selalu mengerjakan skripsi dan memerhatikan lagi tata karma dalam berbicara dan bertemu dosen.
6. Mas Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga bersedia untuk diganggu aktivitasnya dalam menandatangani surat-surat perkuliahan untuk kelulusan penulis selama ini.

7. Para Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNILA yang tidak dapat disebutkan satu per satu telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat yang banyak selama proses perkuliahan maupun administrasi dari semester 1 sampai semester 9 ini.
8. Kepada Ayah, Ibu, dan Adikku yang selama ini selalu mendukung, mendoakan, dan menghiasi kebahagiaan penulis agar lulus dalam perkuliahan.
9. Teman-teman Angkatan 20 HI Unila yang telah menemani, mendukung, dan bekerjasama dalam setiap kehidupan penulis baik tugas kuliah maupun canda tawa kalian.
10. Terimakasih juga sebesar-besarnya kepada Teman KKN-ku yakni Ma'ruf, Divia, Fadilah, Jessica, Najwa, dan Syam serta Kepala Desa Gunung Cahya Way Kanan (Bapak Nanggam) beserta Ibu Aidawati, S.Pd dan para warga desa yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan yang penulis rasakan disana ketika waktu KKN Tahun 2023.
11. Terimakasih kepada semua guru dan temanku Play Group *Al-Amin*, TK Pratama *Kids*, SD Kartika II-5, SMP Kartika II-2, dan SMAS Al-Azhar Bandar Lampung yang pernah satu atap pendidikan bersama penulis baik belajar dan bersanda gurau saat masa sekolah.
12. Terimakasih kepada para tante, om, bulek, palek, sepupu ku serta sepupu keponakanku (Arfan) yang selama ini sudah mendoakan, mendukung, dan membantu penulis untuk segera lulus dalam bangku perkuliahan.
13. Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Lampung beserta teman-teman PKL HI UNILA, ITERA, DARMAJAYA, UMITRA, UBL 2023 dan teman-teman Sosiologi Unila 20 (Ismi, Bela, Dewi, & Delsa) yang telah menyemangati, memberikan nasihat, canda tawa, dan menemani penulis sejak semester 7 di bangku perkuliahan.

Bandar Lampung, 21 November 2024

Bintang Widia Sandi Haryawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Sengketa Batas Maritim	7
2.2. Konsep Sepuluh Garis Putus-Putus	10
2.3. Penelitian Terdahulu.....	12
2.4. Kerangka Pemikiran	16
III. METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1. Jenis Penelitian	18
3.2. Fokus Penelitian	19
3.3. Jenis & Sumber Data	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data	21
3.5. Teknik Analisis Data	21
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Sepuluh Garis Putus-Putus dan Aksi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan	23
4.2. Analisis Respons Vietnam.....	33
4.2.1. Arbitrase	34
4.2.2. Negosiasi.....	36
4.2.3. Kerjasama Pertahanan Vietnam dengan Negara-negara Mitra.....	39
V. SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1. Simpulan.....	50
5.2. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Area Kerjasama Vietnam-Amerika Serikat	41
2. Area Kerjasama Jepang-Vietnam.....	44
3. Area Kerjasama India-Vietnam.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.....	2
2. Peta Sepuluh Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.....	3
3. Peta Standar Tiongkok Tahun 2023.....	4
4. Kerangka Pemikiran.....	17
5. Teknik Analisis Data oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).....	21
6. Peta Ilustrasi Sepuluh Garis Putus-Putus Tiongkok.....	24
7. Personel AL Tiongkok di Pulau Zhongjian Tahun 1975-1979.....	27
8. Ilustrasi Kapal <i>Haiyang Dizhi</i> 10 di Kepulauan Natuna.....	28
9. Kapal Perang Tiongkok sedang melakukan latihan militer di <i>Louisa Reef</i>	28
10. Ilustrasi Kapal Penjaga Pantai Tiongkok di <i>Half Moon Shoal</i>	29
11. Pesawat militer dan Kapal Penjaga Pantai Tiongkok di <i>Scarborough Shoal</i> . .	30
12. Kapal Induk <i>Shandong</i> di Selat <i>Luzon</i>	30
13. Ilustrasi Pesawat udara militer Tiongkok di wilayah udara Taiwan	31

DAFTAR SINGKATAN

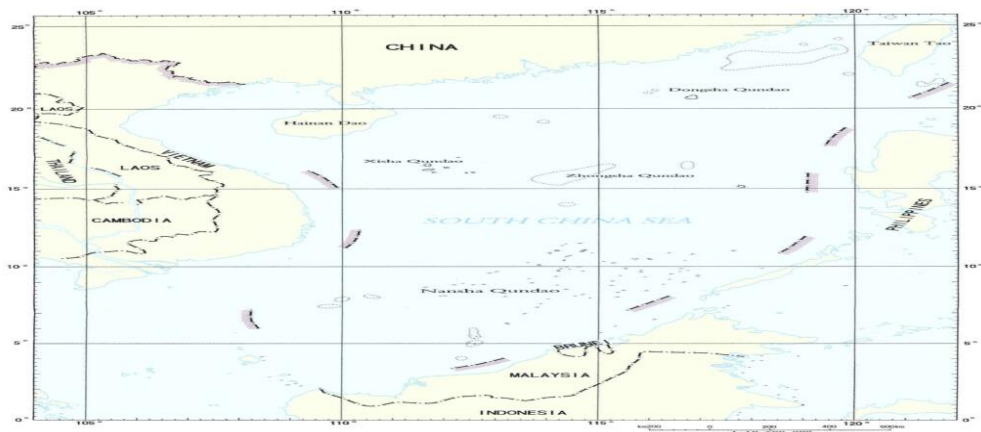
A2/AD	:	<i>Anti-Access/Area-Denial Strategy</i>
AL	:	Angkatan Laut.
ALUTSISTA	:	Alat Utama Sistem Senjata.
AS	:	Amerika Serikat.
ASCM	:	<i>Anti-Ship Cruise Missiles.</i>
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
C4SIR	:	<i>Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance.</i>
CCG	:	<i>China Coast Guard.</i>
CNOOC	:	<i>China National Offshore Oil Corporation.</i>
EXTRA	:	<i>Extended Range Artillery.</i>
LTS	:	Laut Tiongkok Selatan.
PAFMM	:	<i>The People's Armed Forces Maritime Militia.</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PLAAF	:	<i>The People's Liberation Army Air Force.</i>
PLAN	:	<i>The People's Liberation Army Navy.</i>
RIMPAC	:	<i>The Rim of the Pacific Exercise.</i>
SCS	:	<i>South China Sea.</i>
Tcf	:	Triliun Kaki Kubik.
UNCLOS	:	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea.</i>
UNESCO	:	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.</i>
VFSF	:	<i>Vietnam Fisheries Surveillance Force.</i>
VNCG	:	<i>Vietnam National Coast Guard.</i>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Konflik maritim antara Vietnam-Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang bermula pada Bulan Agustus tahun 1973 saat dua negara mengklaim 10 pulau dan Tiongkok juga mendirikan pabrik pengolahan ikan di Kepulauan *Paracel*. Vietnam dan Tiongkok sama-sama menjaga setiap pulau yang diklaimnya dengan mengerahkan tentara beserta kapal perang dan pesawat tempur sehingga memperkuat kedaulatan teritorialnya di Kepulauan *Paracel*. Akibatnya, hubungan Vietnam-Tiongkok memanas karena saling menembakkan peluncur roket dan senjata api yang dibawanya sehingga banyak tentaranya menjadi korban jiwa dan kapal perang mengalami kehancuran di akhir pertempuran tahun 1974 (Yoshihara, 2016: 46-49). Pasca Vietnam merdeka di tahun 1975, konflik maritim melawan Tiongkok juga berlanjut dimana Vietnam-Tiongkok memperebutkan *Johnson South Reef* yang berada di Kepulauan *Spartly* pada tahun 1987. Awal konflik dipicu oleh pengadopsian Rencana Pengukuran Permukaan Laut Global dari UNESCO untuk mendirikan 200 stasiun pengamatan laut di seluruh dunia. Setelahnya, Tiongkok merespons dengan membangun stasiun pengamatan laut dan Vietnam memasang bendera nasionalnya sehingga dua negara saling mengamankan klaim *Johnson South Reef* dengan menempatkan tentara beserta kapal perangnya. Sayangnya, konflik Vietnam dan Tiongkok tidak berhenti karena dua negara saling melepaskan peluncur roket dan senjata api yang akhirnya membuat Vietnam kalah untuk mendapatkan klaim atas *Johnson South Reef* dan konflik dimenangkan oleh Tiongkok untuk melanjutkan proyek Stasiun Pengamatan Kelautan *Johnson Reef* di Bulan Agustus 1988 (Wenhui, 2009).

Penyebab konflik maritim Laut Tiongkok Selatan lainnya adalah penerapan sembilan garis putus-putus oleh Tiongkok. Klaim Tiongkok atas sembilan garis putus-putus juga mencaplok wilayah maritim dari masing-masing negara di sekitarnya yakni Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, Indonesia. Cara-cara Pemerintah Tiongkok dalam mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan antara lain, Pertama yakni mengeksploitasi sumber daya energi khususnya minyak bumi sebesar 1,423 barrel dan gas alam sebesar 5.7 triliun kubik (Tcf) yang terkandung di Laut Tiongkok Selatan sepanjang tahun 2023 (EIA, 2024: 2-3). Pemerintah Tiongkok melaksanakan kendali tersebut untuk meningkatkan kebutuhan energi nasional yang tentunya dijalankan oleh perusahaan energi Tiongkok (CNOOC) dan mengurangi ketergantungan impor minyak bumi dari negara lain sekitar 11,3 juta barrel di tahun 2023 (EIA, 2024a). Kedua yakni Tiongkok melakukan sejumlah aktivitas militer seperti patroli kapal-kapal angkatan laut, latihan pasukan angkatan darat dan udara, dan reklamasi lahan untuk membangun fasilitas militer di beberapa pulau. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Tiongkok dalam melakukan aktivitas militer di Laut Tiongkok Selatan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim beserta mengembangkan kemampuan pertahanan dalam melawan musuh yang akan mengambil wilayah maritimnya (Orr, 2024).



Gambar 1. Peta Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

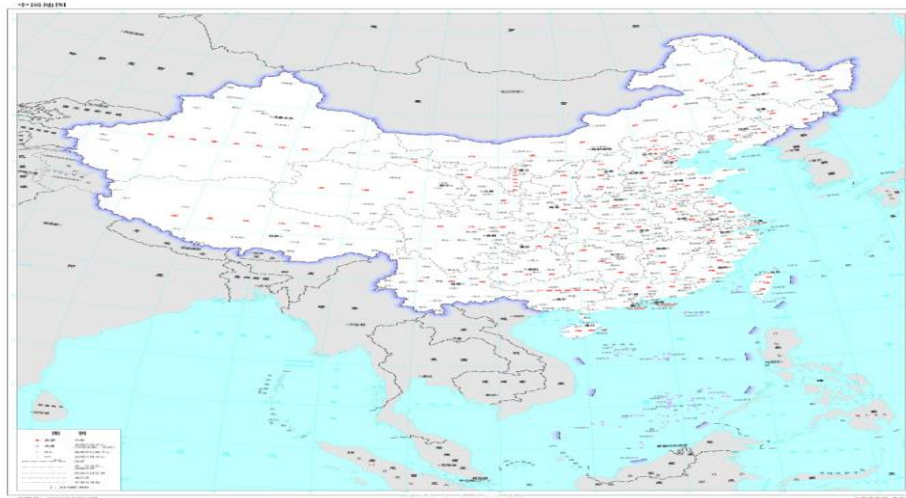
Sumber: *Maritime Affairs Program* (2023).

Klaim sembilan garis putus-putus di Laut Tiongkok Selatan mengalami sebuah perubahan. Perubahan ini diakibatkan oleh pembuatan peta standar Tiongkok yang dipublikasikan oleh Kementerian Sumber Daya Alam pada tanggal 28 Agustus 2023. Peta standar Tiongkok juga menambah 1 garis putus-putus yang memperbaharui sembilan garis putus-putus yang dulunya diserahkan kepada Badan Arbitrase Maritim PBB tahun 2009 dan bertambah menjadi sepuluh garis putus-putus. Sepuluh garis putus-putus memasukkan wilayah laut Timur Taiwan menjadi klaim maritim Tiongkok. Alasan dibalik Pemerintah Tiongkok mempublikasikan peta standar 2023 karena posisi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sangat jelas berbentuk kegiatan militer dan eksplorasi sumber daya energi sehingga otoritas Tiongkok memperbaharui dan mempublikasikan peta standarnya setiap tahun (Zhenhuan, 2023). Penerbitan peta standar 2023 menjadi publikasi tahunan Pemerintah Tiongkok dipakai untuk mengelola sumber daya alam dan membangun peradaban bangsanya. Langkah Pemerintah Tiongkok tersebut mendapatkan kritik dari Vietnam. Vietnam menyatakan penerbitan peta maritim terbaru Tiongkok bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan merebut kedaulatan maritimnya atas Kepulauan *Hoang Sa* dan *Truong Sa* yang diklaimnya sejak abad ke-17 (Le, 2023).



Gambar 2. Peta Sepuluh Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Sumber: *US Energy Information Administration (2024)*.



Gambar 3. Peta Standar Tiongkok Tahun 2023.

Sumber: *The Atlas Report* (2023).

Vietnam merespons penerbitan peta standar Tiongkok 2023 dengan berbagai cara antara lain, pertama yakni Vietnam membangun *anti access and denial area* sebagai satu set kemampuan pertahanan militer berupa rudal presisi jarak jauh, rudal jelajah anti-kapal, ranjau, kapal selam, dan rudal permukaan ke udara terintegrasi yang bertujuan untuk menggertak Tiongkok dan membatasi kebebasan bermanuvernya di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kedua yaitu militer Vietnam membeli kapal fregat *Gepard* dan korvet *Tarantul V* buatan Rusia beserta pesawat *Sukhoi Su-30MK2* yang diperlukan untuk menyerang Tiongkok di LTS (IISS, 2023:6-7). Ketiga yakni Pemerintah Vietnam memperluas kehadiran Pasukan Penjaga Pantai Vietnam dengan kapal maritim paramiliter dan dipersenjatai meriam air untuk melawan militer Tiongkok serta mengamankan kedaulatan maritim Vietnam di LTS (lawnet, 2022).

Keempat yakni Vietnam membangun Pasukan Pengawasan Perikanan Vietnam atau VSFS yang berisikan warga sipil dan dipersenjatai oleh senapan mesin beserta bahan peledak bertujuan untuk menyaingi Pasukan Pengawasan Perikanan Tiongkok atau PFAMM (D. G. Anh Nguyen Nhat, 2018). Kelima yakni militer Vietnam telah meluncurkan artileri roket berpemandu *Extended Range Artillery* untuk menghancurkan infrastruktur militer ilegal dari Tiongkok yang

mengancam kedaulatan maritim Vietnam di seluruh Kepulauan *Spratly* pada Agustus 2016 (Torode, 2016). Keenam yakni Vietnam melakukan reklamasi lahan 280 hektar untuk membangun mercusuar, landasan pacu pesawat terbang, dermaga, dan infrastruktur militer di Kepulauan *Spartly* sebagai langkah strategis dalam menjaga wilayah kedaulatan maritimnya di Bulan November 2023 (Cen, 2024).

1.2. Rumusan Masalah

Situasi Laut Tiongkok Selatan yang tidak kondusif menimbulkan kerawanan konflik maritim yang berkepanjangan dan berdampak pada kawasan regional. Situasi Laut Tiongkok Selatan juga diperkeruh oleh sikap Tiongkok yang mengklaim zona maritim Vietnam tidak sesuai aspek sejarah dan hukum sehingga Vietnam dirugikan dengan memperoleh wilayah maritim secara tidak adil. Tiongkok mengklaim wilayah laut Tiongkok Selatan berdasarkan sembilan dan sepuluh garis putus-putus yang memberikan legitimasi padanya untuk menekan Vietnam agar tidak mengambil wilayah maritimnya melalui berbagai cara. Selain itu, Vietnam mempunyai hak klaimnya atas 2 kepulauan besar yakni Kepulauan *Paracel-Spartly* yang masing-masing telah didukinya sejak abad ke-17. Klaim Vietnam atas 2 kepulauan tersebut karena memberikan dampak positif dari sisi ekonomi, pertahanan, dan strategis yang masing-masing membantu Vietnam dalam memperkuat kedaulatan maritimnya yang berjangka panjang. Vietnam prihatin terhadap situasi di Laut Tiongkok Selatan yang memanas ini dan tentunya kedaulatan maritim Vietnam yang dicaplok Tiongkok menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan kehidupan maritim nasionalnya. Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penulis mengajukan suatu pertanyaan penelitian yakni Bagaimana respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sepuluh garis putus-putus dan aksi Tiongkok yang mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ilmiah mengenai respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kajian hubungan internasional khususnya konsep Sengketa batas maritim yang menganalisis klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok dengan mencaplok wilayah maritim Vietnam di Laut Tiongkok Selatan.
2. Secara praktis, penelitian ilmiah yang membahas respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok dapat menyediakan strategi hingga kebijakan maritim untuk menangani isu pencaplokan wilayah oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Terakhir, upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat berperan menjadi pihak tengah di isu konflik maritim tersebut agar menghasilkan keputusan adil untuk pihak-pihak terkait yang mana peristiwa ini sangat sarat dengan kekuasaan Tiongkok untuk mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan dan berpengaruh pada stabilitas kawasan regional di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Sengketa Batas Maritim

Menurut Hukum Laut Internasional 1982, batas maritim merupakan batas negara yang berfungsi untuk mengidentifikasi tepi perairan internasional. Biasanya, batas maritim ditetapkan pada jarak tertentu dari garis pantai yurisdiksi. Batas maritim ada dalam konteks perairan teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Penetapan batas maritim oleh setiap negara memiliki implikasi strategis, ekonomi, dan lingkungan yang biasanya membatasi wilayah hak nasional eksklusif atas sumber daya laut meliputi fitur, batas, dan zona maritim. Dalam mengatur batas maritim seringkali terdapat permasalahan yang dialami oleh satu negara dengan lainnya hal ini disebut sengketa batas maritim (Hasan et al., 2019: 89).

Sengketa batas maritim adalah masalah yang berkaitan dengan penetapan batas zona maritim yang berbeda antara atau di antara negara-negara. Selain itu, sengketa batas maritim sering terjadi karena kepentingan komersial, ekonomi, dan keamanan. Semua negara mengklaim zona maritimnya yang berbeda sesuai dengan kepentingan sendiri. Sengketa batas maritim sebagian besar terjadi karena klaim yang tumpang tindih antara negara-negara yang berdekatan atau berseberangan untuk laut teritorial 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, dan landas kontinen yang dapat melampaui 200 mil laut karena klaim kedaulatan yang saling bertentangan atas pulau dan wilayah daratan yang sama (Abba, 2022: 10). Sengketa maritim yang berkepanjangan dianggap sebagai sengketa yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang wajar. Penyelesaian sengketa batas maritim antar negara merupakan

fenomena internasional yang diatur oleh hukum internasional. Dalam konteks maritim, Hukum Laut Internasional 1982 merupakan kodifikasi khusus yang mulai berlaku pada tahun 1994. Sengketa maritim tertunda penyelesaiannya apabila negara-negara gagal mencapai solusi permanen karena berbagai kendala nasional dan internasional. Terkadang, pemerintah suatu negara pantai mengutamakan masalah bilateral lainnya dengan negara pantai yang berdekatan selain sengketa maritim (Hasan et al., 2019: 91).

Ketika sengketa maritim terjadi di antara negara-negara, langkah pertama dan terpenting untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah negosiasi. Sebagian besar, pihak-pihak yang bersengketa gagal bernegosiasi untuk mencapai solusi. Dalam sebagian besar kasus, sengketa batas maritim terjadi karena klaim yang tumpang tindih di berbagai zona maritim dan klaim kedaulatan atas pulau-pulau yang saling bertentangan. Selain itu, langkah kedua yakni arbitrase. Cara ini paling terkenal di dalam kasus maritim jika suatu negara gagal bernegosiasi dengan negara lain dalam hal batas maritim maka salah satu negara bertikai membawa kasus ke dalam pengadilan atau arbitrase agar memperoleh suatu kekuatan hukum tetap atas kasus yang diadili (Hasan et al., 2019: 93-94).

Sengketa batas maritim antara Tiongkok dan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan belum mendapatkan titik terang sampai saat ini. Laut Tiongkok Selatan yang merupakan kawasan strategis, kaya akan sumber daya alam seperti cadangan minyak dan gas, serta jalur pelayaran penting yang memfasilitasi perdagangan internasional. Baik Cina maupun Vietnam menegaskan hak historis atas berbagai bagian wilayah maritim ini yang menyebabkan klaim teritorial yang saling bertentangan yang meningkat menjadi konfrontasi diplomatik dan pertikaian militer. Klaim Vietnam seringkali didasarkan pada peta dan catatan sejarah yang berasal dari berabad-abad yang lalu yang menegaskan kedaulatan atas Kepulauan *Paracel* dan *Spratly*. Sebaliknya, klaim Tiongkok diperkuat oleh "sembilansepuluh garis putus-putus" yaitu titik-titik terluar yang mencakup sebagian besar Laut Tiongkok Selatan didasarkan pada fakta sejarah dan hukum. Perbedaan interpretasi atas hukum dan sejarah ini tidak hanya memicu sentimen nasionalis di kedua negara tetapi juga mempersulit negosiasi diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Reuters, 2024).

Beberapa tahun terakhir, situasi telah meningkat baik Tiongkok maupun Vietnam terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menegaskan klaimnya. Tiongkok telah melakukan berbagai proyek reklamasi lahan yang ekstensif dan mendirikan instalasi militer di beberapa pulau di Kepulauan *Paracel-Spratly* yang menuai kritik tajam dari Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Vietnam yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan maritimnya dan telah terlibat dalam berbagai kegiatan eksplorasi minyak di wilayah-wilayah yang diklaim Tiongkok menyebabkan terjadinya konfrontasi di laut. Insiden-insiden ini tidak hanya meningkatkan ketegangan antara kedua negara tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara lain di kawasan tersebut tentang potensi konflik maritim berkepanjangan (CPA, 2024).

Upaya penyelesaian sengketa maritim mencakup negosiasi diplomatik, dialog multilateral, dan membawanya ke pengadilan arbitrase internasional. Apabila Tiongkok dan Vietnam terlibat dalam suatu diskusi maka kedua negara dapat menetapkan kode etik guna mengelola aktivitasnya di perairan yang disengketakan. Terkadang, upaya negoasiasi sulit dicapai karena kedua negara terhalang oleh sentiment nasionalis yang membuat sengketa maritim sulit diselesaikan. Selain negosiasi kedua negara yang dapat digunakan, peran organisasi internasional dan mediator pihak ketiga mungkin juga penting dalam memfasilitasi diskusi dan memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak terwakili secara memadai dalam setiap perjanjian potensial. Dalam hal ini, ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menyediakan platform untuk dialog dan membantu membangun kerangka kerja untuk penyelesaian konflik. ASEAN dan PBB dapat mendorong Vietnam dan Tiongkok untuk patuh terhadap Hukum Laut Internasional 1982 yang menguraikan hak dan tanggung jawab negara-negara dalam penggunaan lautan dunia. Namun, kedua negara tidak mencapai kesepakatan baik negoasiasi maupun mediasi maka jalan selanjutnya adalah membawa sengketa maritim ini kepada Pengadilan Arbitrase Internasional yang berhak mengadili dan memutuskan sengketa maritim Laut Tiongkok Selatan dapat menemukan titik terangnya bagi kedua belah pihak (BBC, 2023).

2.2. Konsep Sepuluh Garis Putus-Putus

Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok telah membuat dan mempublikasikan peta maritim terbarunya yang Tiongkok klaim di tanggal 28 Agustus 2023. Peta maritim terbaru dari Tiongkok menyertakan sepuluh garis putus-putus yang mencakup Pulau Taiwan. Klaim atas wilayah Taiwan ini menjadi wilayah kekuasaan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan untuk jangka waktu yang panjang. Sebelum merilis klaim sepuluh garis putus-putusnya, Tiongkok terlebih dahulu merilis peta sembilan garis putus-putus yang diterbitkannya sejak 1947. Klaim Tiongkok tersebut merupakan cara Tiongkok untuk menguasai seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan termasuk cadangan sumber daya alam dan menjaga wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan kehadiran militernya (Clayman, 2023).

Seiring berjalannya waktu, sembilan garis putus-putus menimbulkan masalah diantara negara-negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan yang melihat klaim Tiongkok tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada Hukum Laut Internasional 1982. Tiongkok juga sama sekali tidak mematuhi batasan dalam penetapan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangganya seperti laut teritorial, batas landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan sebagainya. Apalagi, jarak 200 mil laut merupakan batas maksimal bagi setiap negara pantai untuk mengklaim wilayah maritimnya dan jika ditambah lebih dari 200 mil laut maka negara pantai dapat melalui serangkaian perjanjian dengan negara bersangkutan agar tidak menimbulkan konflik bersama (Clayman, 2023).

Sepuluh garis putus-putus merupakan titik yang Tiongkok klaim secara sejarah sampai saat ini menjadi kedaulatan maritimnya di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok mengklaim Laut Tiongkok Selatan yang mencakup berbagai pulau, terumbu karang, dan fitur maritim yang banyak di antaranya juga diklaim oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Implikasi dari sepuluh garis putus-putus sangat mendalam karena tidak hanya memengaruhi geopolitik regional tetapi juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap hukum maritim internasional dan hak navigasi. Di sisi lain, klaim Tiongkok yang tumpang tindih telah menyebabkan ketegangan dan konfrontasi terutama

Tiongkok telah terlibat dalam reklamasi lahan dan aktivitas militer yang ekstensif di wilayah tersebut yang telah menuai kritik dari masyarakat internasional. Walaupun sepuluh garis putus-putus menjadi satu-kesatuan dengan sembilan garis putus-putus tetapi hal itu mempunyai makna antara lain, hak kepemilikan Tiongkok atas sejumlah gugusan pulau yang dikelilinginya, hak-hak historis Tiongkok seperti penangkapan ikan dan eksplorasi sumber daya alam juga dilindungi, dan dapat menjadi garis pembatas maritim dengan negara lain (Graham, 2013).

Persaingan Tiongkok dengan sejumlah negara pengklaim untuk menguasai Laut Tiongkok Selatan berujung konfrontasi antara kapal penangkap ikan, kapal penjaga pantai, dan pasukan militer dari berbagai negara. Proyek reklamasi lahan dan aktivitas militer Tiongkok yang ekstensif di Laut Tiongkok Selatan telah semakin memperburuk ketegangan dan pembangunan pulau buatan serta instalasi militer telah menuai kritik luas dari masyarakat internasional yang memandang tindakan ini sebagai tindakan agresif dan bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Sebagai tanggapan terhadap perkembangan ini, berbagai negara dan organisasi internasional telah menyerukan pendekatan berbasis aturan untuk menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Hukum Laut Internasional 1982 berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk menangani klaim maritim dan memastikan kebebasan navigasi. Namun, penegakan prinsip-prinsip kelautan tetap bergejolak karena kompleksitas kepentingan nasional dan berbagai pemahaman mengenai hak historis. Seiring dengan terus berkembangnya situasi, sepuluh garis putus-putus kemungkinan akan tetap menjadi masalah yang kontroversial yang memengaruhi hubungan diplomatik dan dinamika keamanan di kawasan Asia-Pasifik (Mia et al., 2024: 80-81).

Penafsiran Vietnam terhadap sepuluh garis putus-putus di Laut Tiongkok Selatan merupakan masalah rumit yang mencerminkan perspektif historis, hukum, dan geopolitik. Vietnam menegaskan bahwa sepuluh garis putus-putus melanggar batas perairan teritorialnya dan melanggar hak kedaulatannya, khususnya yang menyangkut Kepulauan *Paracel* dan *Spratly*. Pemerintah Vietnam menekankan keberadaan historisnya di wilayah tersebut, dengan alasan bahwa klaimnya

didukung oleh catatan sejarah dan Hukum Laut Internasional 1982. Pemerintah Vietnam menekankan keberadaan historisnya di Laut Tiongkok Selatan dengan alasan bahwa klaimnya didukung oleh catatan sejarah dan hukum internasional khususnya Hukum Laut Internasional 1982. Lebih lanjut, sikap Vietnam terhadap sepuluh garis putus-putus berakar pada konteks keamanan regional dan kedaulatan nasional yang lebih luas. Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur maritim penting untuk perdagangan internasional dan kaya akan sumber daya alam sehingga penafsiran Vietnam terhadap sepuluh garis putus-putus bukan sekadar sengketa hukum, tetapi juga masalah kepentingan dan keamanan nasional. Pemerintah Vietnam secara konsisten berupaya menegaskan klaimnya melalui jalur diplomatik dan forum internasional dengan mengadvokasi berbagai pendekatan untuk menyelesaikan sengketa maritim dan keinginannya untuk melibatkan negara-negara lain di wilayah Laut Tiongkok Selatan agar menciptakan stabilitas dan perdamaian (Intpreter, 2022) .

2.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal nasional *Lex Genaralis* tahun terbit 2020 dan memakai konsep sengketa internasional, arbitrase, dan metode penelitian kualitatif normatif. Peneliti menjelaskan Filipina yang mempersengketakan klaim *nine dash line* Tiongkok di Laut Cina Selatan yang tidak sesuai dengan Hukum Laut Internasional 1982. Filipina membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk mendapatkan keadilan sebab wilayah kedaulatan maritimnya telah lama dicaplok oleh Tiongkok sejak tahun 2013. Filipina menuding Tiongkok yang membangun sejumlah pulau buatan dan mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang di Kepulauan *Paracel-Spartly*. Selain itu, pertimbangan hakim Mahkamah Internasional menyebutkan pembangunan pulau buatan tidak sesuai dengan Hukum Laut Internasional 1982. Apalagi Tiongkok mereklamasikan pulau-pulau buatanya untuk dibangun landasan pacu udara maupu pelabuhan militernya sehingga hakim tidak memberikan hak penuh kepada Tiongkok atas pelanggaran wilayah maritim dari Filipina. Tepatnya tahun 2016, Pengadilan

Internasional memutuskan hukuman kepada Tiongkok karena telah melanggar sejumlah pasal dalam Hukum Laut Internasional 1982 dan termasuk mencaplok kedaulatan maritim Filipina (Adi, 2020: 39-51).

Kedua, jurnal nasional *Uti Possidetis* Tahun Terbit 2020 yang memakai konsep negosiasi dan metode penelitian hukum normatif. Peneliti menjelaskan sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok menimbulkan konflik maritim. Selama ini, sejumlah nelayan asal Tiongkok sering mengambil ikan-ikan di perairan Natuna untuk memenuhi kebutuhan perikanan nasional dan dikawal oleh Kapal Penjaga Pantai. Aktivitas pencurian ikan tersebut masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perilaku Tiongkok ini merugikan perekonomian maritim Indonesia yang selama bertahun-tahun telah kehilangan potensi perikanan. Pemerintah Indonesia berfokus mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara untuk mencegah datangnya nelayan serta kapal penjaga pantai Tiongkok. Indonesia sendiri berupaya untuk mengadakan hubungan bilateral dengan Tiongkok guna mendiskusikan perihal kegiatan ilegalnya yang membawa konteks *nine dash line*. Peneliti juga menawarkan upaya negosiasi kepada Indonesia untuk mengurangi ketegangan dengan Tiongkok antara lain prinsip itikad baik, larangan memakai kekerasan, kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, kesepakatan antara pihak yang bersengketa dan kebebasan memilih hukum terhadap pokok sengketa. Terakhir, cara-cara tersebut sebaiknya diawasi oleh pihak-pihak terkait sehingga keadilan hukum tetap berjalan maksimal (Maulana & Repindowaty, 2021: 243-261).

Ketiga, jurnal nasional *Lex Privatum* tahun terbit 2013 yang memakai konsep *maritime militia* dan metode penelitian kualitatif-pendekatan yuridis normatif. Peneliti menjelaskan keputusan Pengadilan Arbitase Internasional yang menyatakan bahwa tindakan Cina di Laut Cina Selatan sangat bertentangan terhadap Hukum Laut Internasional 1982 dan negara-negara pengklaim juga dirugikan oleh aktivitas Cina yang sering mengambil sumber daya perikanan. Salah satu negara yang disorot oleh peneliti ialah Indonesia. Dampak hukum Pengadilan Arbitase Internasional terhadap Indonesia antara lain, Kepulauan Natuna menjadi milik Indonesia sepenuhnya karena klaim *nine dash line* Cina dinyatakan gagal oleh hakim dan Cina dilarang mengklaim sejumlah fitur maritim

di area 200 mil laut yang berada di Kepulauan Natuna sehingga tidak bertumpang tindih dengan wilayah maritim Cina. Selain itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi jalan bagi Indonesia untuk menjadi negositor, mediator, dan insiator dalam pembentukan kode etik antara ASEAN dan Cina hingga mempertemukan kedua pihak di sejumlah acara pertemuan tingkat multilateral sejak 2018 sampai 2021 (Hizkia et al., 2024).

Keempat, jurnal nasional *Veritas et Justicia* tahun terbit 2015 yang menggunakan konsep hukum laut internasional dan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis normatif. Peneliti menjelaskan perilaku Cina yang tidak patuh terhadap pelaksanaan keputusan hakim Pengadilan Arbitase Internasional dinilai gagal meredam konflik dengan negara-negara pengklaim. Bahkan, keputusan hakim Pengadilan Arbitase Internasional yang menolak keabsahan dari *nine dash line* tidak disetujui oleh Cina. Pertama yaitu Pengadilan Arbitase Internasional tidak memenuhi unsur hukum. Hal ini dikarenakan Cina dan Filipina ingin menyelesaikan sengketa maritim ini secara bilateral dan tidak dilanjutkan ke meja hijau. Kedua, yakni kedaulatan maritim Cina bukan milik sepenuhnya. Cina menilai keputusan hakim Pengadilan Arbitase Internasional sangat bertolak belakang terhadap keadilan negaranya yang mana Cina berhak untuk mengklaim *nine dash line* berdasarkan *nota verbale* 2009 dan peta maritim yang dibuat di setiap tahun. Ketiga, yakni bukti sejarah Cina diabaikan di Pengadilan Arbitase Internasional. Keputusan hakim yang memihak Filipina sangat tidak sesuai dengan keadilan yang diterimanya. Padahal, masyarakat Cina kuno pertama kalinya menemukan Laut Cina Selatan sejak 2000 tahun lalu dan dioperasikan aktivitas maritim disana (Fatmawati & Aprina, 2019: 105-129).

Kelima, jurnal kewarganegaraan tahun terbit 2022 yang menggunakan studi literatur. Peneliti menjelaskan Hukum Laut Internasional 1982 digunakan oleh setiap negara pengklaim Laut Cina Selatan sebagai dasar hukum utama yang diaplikasikan di negaranya dan juga untuk mengurangi ketegangan konflik dengan negara lain. Seperti halnya, Tiongkok yang menjadi pengklaim utama Laut Cina Selatan tidak sepenuhnya mengikuti aturan Hukum Laut Internasional 1982 karena Tiongkok ingin memperoleh semua hak-hak maritimnya tanpa pertentangan dari negara manapun. Tetapi, langkah Tiongkok tersebut ditolak

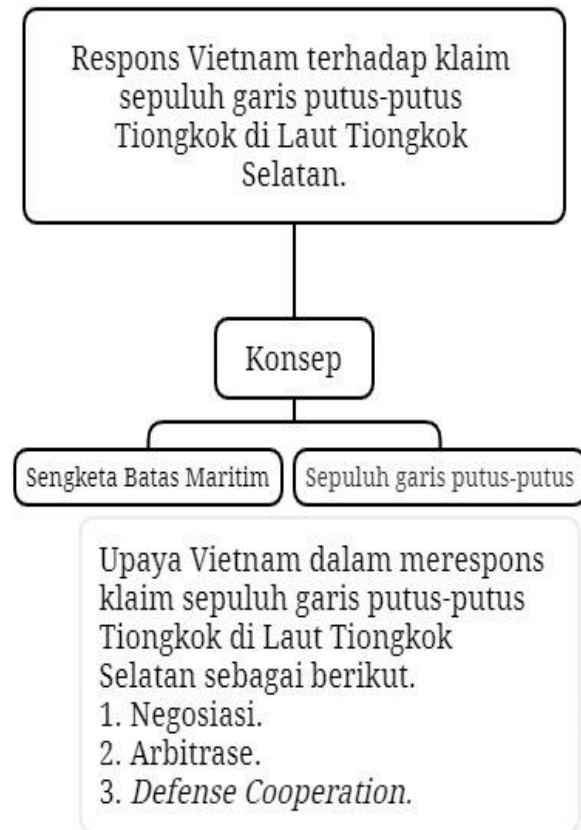
oleh sebagian negara pengklaim yang hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada perdamaian kawasan. Bahkan, klaim *nine dash line* Tiongkok tidak diakui oleh Pengadilan Arbitase Internasional dan keputusan hakim yang melihat Tiongkok hanya memperkuat klaim atas *traditional fishing ground* sebagai area aktivitasnya sejak zaman Dinasti Cina kuno. Padahal *traditional fishing ground* persis dengan *traditional fishing rights* yang berhubungan erat sehingga klaim kunonya tersebut tidak dapat dibantah apapun dengan keputusan hakim Pengadilan Arbitase Internasional. Walaupun Tiongkok melanggar pasal-pasal hukum laut internasional 1982 dan menangkap ikan di area Kepulauan Natuna atau Kepulauan *Spartly-Paracel* tetap saja usaha-usahanya untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan harus terlaksana dengan baik (Baylon et al., 2021: 691-700).

Pemaparan lima penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan diatas bahwa setiap peneliti sama-sama membangun narasi yang menjelaskan keterlibatan Tiongkok dalam sengketa maritim Laut Tiongkok Selatan (LTS). Tiongkok yang menolak keputusan Pengadilan Arbitase Internasional tentang klaim *nine dash line* dan melanjutkan aktivitasnya di Laut Tiongkok Selatan menjadi penyebab konflik maritim bersama negara pengklaim belum menurun. Tentunya, Vietnam sebagai negara pengklaim LTS yang menolak klaim *nine dash line* Tiongkok sehingga membawa penulis memfokuskan riset tentang respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok. Alasan penulis mengangkat riset yang berbeda karena penelitian sebelumnya berfokus pada penolakan negara-negara pengklaim atas klaim *nine dash line* maupun penolakan Tiongkok atas keputusan Pengadilan Arbitase Internasional yang melarang untuk mengklaim seluruh wilayah LTS. Selain itu, beberapa peneliti lebih memakai sejumlah konsep antara lain *maritime militia*, hukum laut internasional 1982, arbitase, dan negosiasi. Sementara penulis menggunakan konsep Sengketa batas maritim yang digunakan untuk mendeskripsikan klaim sepuluh garis putus-putus serta aksi Tiongkok di LTS dan menganalisis respons Vietnam dalam mencegah konflik maritim dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Konflik maritim antara Vietnam dan Tiongkok sampai saat ini belum menemukan titik terang. Konflik Vietnam dan Tiongkok bermula pada isu perebutan wilayah maritim yang bersamaan dengan negara-negara pengklaim sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap situasi regional di Laut Tiongkok Selatan. Vietnam sebagai negara penuntut dalam konflik maritim Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang diperkeruh oleh penerapan sepuluh garis putus-putus Tiongkok di wilayah LTS yakni Kepulauan *Paracel-Spartly*. Setiap upaya militer Vietnam untuk menekan pergerakan militerisasi Tiongkok di LTS tidak membuat Tiongkok untuk menarik pasukannya. Upaya militer Vietnam semakin membuat militer Tiongkok lebih agresif dengan menambah jumlah pasukan beserta ALUTSISTA untuk memberikan penegasan atas klaim maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Konflik maritim Laut Tiongkok Selatan (LTS) menyebabkan Vietnam harus mempertegas kedaulatan maritimnya dengan baik. Vietnam dalam mempertegas kedaulatan maritim berdasarkan sejarah dan peraturan perundang-undangan nasional sehingga dapat meyakinkan dunia internasional bahwa Vietnam berhak atas Kepulauan *Paracel-Spartly* di wilayah LTS. Selanjutnya, penulis beranggapan bahwa Vietnam harus melakukan cara-cara yang dapat memperkuat keterlibatannya dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan seperti melakukan negosiasi, arbitrase, dan *defense cooperation* guna menegaskan kedaulatan maritim Vietnam di LTS. Oleh sebab itu, konflik maritim Laut Tiongkok Selatan menjadi tantangan bagi Vietnam untuk mengeluarkan setiap strategi matang dalam melindungi kedaulatan maritimnya dibalik klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok yang ilegal di Laut Tiongkok Selatan.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menjelaskan isi penelitian yang berjudul, “Respons Vietnam Terhadap Klaim Sepuluh Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Tahun 2019-2024” menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis pendekatan yang dipakai untuk mendalami dan mempelajari sejumlah aspek penelitian dari beberapa pertanyaan dan langkah-langkah dengan tepat. Beberapa pertanyaan dan langkah-langkah yang disajikan dapat membantu penulis untuk memperoleh data yang digunakan dalam meneliti suatu masalah dan didapatkan dari situasi lingkungan tertentu dan kemudian analisa terhadap data yang dikonstruksi melalui tema spesifik (deduktif) menuju tema induktif (Creswell, 2014: 211).

Penelitian tentang respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) tergolong ke dalam pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif. Penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif karena penulis mendeskripsikan klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok yang masuk dalam peta standar Tiongkok di tahun 2023 dan menguraikan peristiwa dibalik terbitnya sepuluh garis putus-putus Tiongkok di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penulis menjelaskan aksi Tiongkok yang terlibat dalam konflik maritim bersama Vietnam di Laut Tiongkok Selatan karena peristiwa tersebut dapat menuntun penulis mengetahui dan menjawab alasan Tiongkok mencaplok wilayah maritim Vietnam selama bertahun-tahun. Penelitian tentang respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok dikatakan pendekatan kualitatif karena penulis menganalisis respons Vietnam terhadap klaim sepuluh

garis putus-putus Tiongkok yang memberikan dampak kerugian bagi Vietnam karena zona maritimnya diambil secara ilegal oleh Tiongkok dan juga menjelaskan sikap Vietnam dengan kehadiran militer Tiongkok di LTS. Apalagi, kehadiran militer Tiongkok yang nyata menjadi tantangan bagi militer Vietnam untuk menanggapi aksi militer Tiongkok melalui negosiasi, arbitrase, dan kerjasama pertahanan. Respons Vietnam terhadap aksi militer Tiongkok dapat membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang tengah dihadapi oleh kedua negara itu.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang berjudul, “Respons Vietnam Terhadap Penerapan Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) Tahun 2019-2024” adalah menguraikan konflik maritim yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan khususnya Vietnam yang ingin mendapatkan dan melindungi kedaulatan maritimnya atas potensi ancaman yang ditimbulkan oleh klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok. Penulis membatasi penelitian respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di tahun 2019-2024. Alasan pertama yakni Vietnam berupaya untuk membawa kasus sengketa ini kepada jalur hukum seperti negosiasi, arbitrase yang diharapkan mendapatkan keadilan atas permasalahan maritimnya dengan Tiongkok. Tentu saja, kejadian diatas diakibatkan oleh klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang mencaplok wilayah maritim Vietnam sehingga beberapa kapal Tiongkok yang tengah beroperasi dengan sengaja menganggap wilayah maritim Vietnam masuk dalam wilayah maritim Tiongkok. Menurut Vietnam, Tiongkok dengan sengaja mengubah perairan yang tidak dipersengketakan menjadi wilayah yang disengketakan sebagai dalih untuk mencegah negara-negara pengklaim bekerjasama dengan perusahaan minyak internasional di beberapa blok minyak yang berada di Laut Tiongkok Selatan.

Selain itu, Vietnam semakin mendekatkan dirinya kepada negara-negara mitra yang dapat mengajaknya bergabung dalam kerjasama pertahanan.

Kerjasama pertahanan ini membantu dan melatih kemampuan militer Vietnam untuk bertahan diri dari ancaman Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Baik Amerika Serikat, Jepang, dan India sama-sama menghasilkan kerjasama yang menguntungkan yang dibuktikan dengan lahirnya beberapa MoU pertahanan seperti transfer pembelian-penjualan senjata, pengiriman kapal-kapal militer, maupun latihan militer dengan angkatan bersenjata Vietnam selama 5 tahun terakhir.

3.3. Jenis & Sumber Data

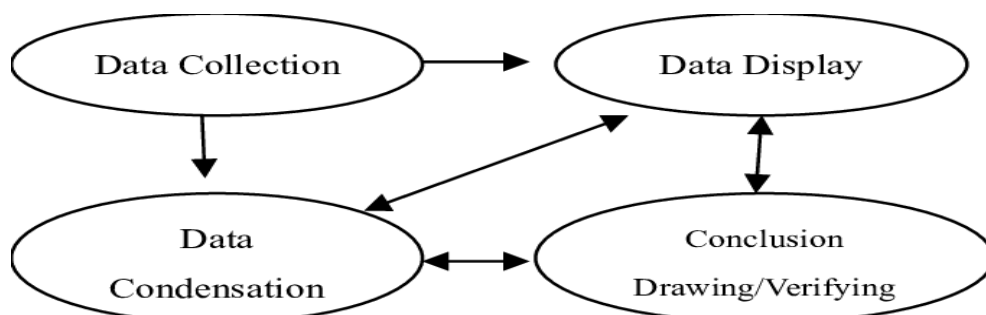
Jenis data yang dipakai di penelitian yang berjudul, “Respons Vietnam Terhadap Klaim Sepuluh Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Tahun 2019-2024” merupakan jenis data sekunder kualitatif yang berwujud dokumen antara lain jurnal, buku, laporan, & situs-situs resmi terkait konflik maritim Vietnam-Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Pengambilan dan penggunaan data-data sekunder tentang konflik maritim Vietnam-Tiongkok di sejumlah produk hukum Vietnam dan konvensi internasional misalnya Deklarasi Pemerintah Vietnam atas Wilayah Maritim 1977, Hukum Maritim Tiongkok 1992, Undang-Undang Hukum Laut Vietnam 2012, & UNCLOS 1982 serta situs-situs *website* Pemerintah Vietnam-Tiongkok, media lokal Vietnam-Tiongkok, dan media internasional yang menyoroti konflik maritim Vietnam melawan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan seperti <https://amti.csis.org/deciphering-vietnams-doctrine-south-china-sea/>, <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>, <https://www.lawfaremedia.org/article/vietnam-threatens-china-litigation-over-south-china-sea> , <https://eastasiaforum.org/2019/12/06/vietnam-confronts-china-in-the-south-china-sea/> , <https://mod.gov.vn/en/intro/vnd/sa-en-dod-frdc/sa-en-dv-mf-ctcs>, <https://vietnamlawmagazine.vn/vietnam-japan-strengthen-defense-cooperation-72313.html>

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul, “Respons Vietnam Terhadap Klaim Sepuluh Garis Putus-Putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Tahun 2019-2024” merupakan *indirect research* yakni penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data-data secara tidak langsung dimana pencarian data diperoleh dari pengelompokan sejumlah sumber tertulis atau dikenal dengan studi dokumentasi misalnya jurnal, buku, laporan riset, dan penelusuran artikel-artikel *online* yang berkaitan dengan tema dan fokus penelitian penulis kemudian data-data yang sudah diperoleh dari sejumlah sumber digunakan untuk menggambarkan aksi Tiongkok dalam klaim sepuluh garis putus-putus & menganalisis penelitian respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Tahun 2019-2024 dengan baik (PKP, 2023).

3.5. Teknik Analisis Data

Penulis memakai langkah-langkah model analisis data interaktif yang dibuat oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang diperoleh dari Buku *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook The Third Edition* yang memberikan 4 langkah untuk analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut (Miles et al., 2014: 11).



Gambar 5. Teknik Analisis Data oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Langkah pertama yakni pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan sejumlah data-data yang relevan dan memudahkan penulis dalam penelitian. Peneliti mengambil beberapa data sekunder misalnya dokumen hukum berbentuk deklarasi sejarah dan Undang-Undang beserta jurnal, buku, laporan-laporan pihak ketiga dan situs-situs *online* yang membahas respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok. Langkah kedua yakni kondensasi data. Kondensasi data artinya proses memilih seluruh data yang diperoleh kemudian difokuskan dan disederhanakan sehingga memperoleh hasil data yang akurat dan tajam untuk dipakai oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga menyimpulkan sejumlah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi tambah. Peneliti pun mengambil sejumlah data atau informasi yang membahas respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan seperti negosiasi, arbitrase, dan kerjasama pertahanan. Apalagi ketiga data yang membahas respons Vietnam terhadap sepuluh garis putus-putus sesuai dengan *gap* maupun konsep sengketa batas maritim yang digunakan oleh peneliti.

Langkah ketiga yaitu penyajian data. Tahapan ini dilakukan oleh peneliti dengan mengolah data ke dalam gambar dan tulisan agar semua data penelitian digabungkan menjadi informasi-informasi naratif yang tersusun rapi dan menggambarkan peristiwa yang terjadi. Peneliti dalam meneliti respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan memasukkan gambar peta sembilan dan sepuluh garis putus-putus, gambar aksi-aksi Tiongkok di sejumlah garis putus-putus, tabel area kerjasama beserta gambar bentuk kerjasama pertahanan Vietnam bersama negara mitra. Terakhir, peneliti mengolah semua data tadi menjadi setiap tulisan naratif yang tidak lupa menggunakan konsep sengketa batas maritim agar pembaca dapat memahami seluruh isi tulisan dengan baik. Langkah keempat yakni penarikan kesimpulan. Tahapan ini digunakan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan dan verifikasi setiap data yang terkumpulkan mengenai respons Vietnam terhadap klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Peneliti tetap menuliskan hasil kesimpulan tersebut dengan jelas dan ringkas agar pembaca dapat memahaminya dengan baik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Konflik maritim antara Vietnam dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan telah berlangsung sejak dekade 1973 hingga 2024, dipicu oleh pendirian pabrik pengolahan ikan oleh Tiongkok di Kepulauan *Paracel* yang ditentang keras oleh Vietnam. Sejak saat itu, kedua negara terlibat dalam berbagai insiden, termasuk pembangunan stasiun pengamatan laut oleh Tiongkok di Kepulauan *Spartly* pada tahun 1987 dan penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankan klaim wilayah. Tiongkok mengklaim hak atas wilayah tersebut melalui sembilan garis putus-putus yang dikeluarkan sejak tahun 1952, yang dianggap merugikan Vietnam secara ekonomi dan melanggar hak maritimnya. Konflik maritim Vietnam-Tiongkok terus berlanjut dengan munculnya klaim sepuluh garis putus-putus oleh Tiongkok pada Agustus 2023 yang mengklaim perairan Taiwan. Vietnam menentang klaim ini, menilai tindakan Tiongkok sebagai sewenang-wenang dan melanggar Hukum Laut Internasional 1982.

Tantangan ancaman maritim Tiongkok yang kuat di Laut Tiongkok Selatan maka Vietnam berupaya menggunakan jalur hukum untuk memperoleh keadilan atas pencaplokan wilayah maritim oleh Tiongkok seperti negosiasi dengan pihak Tiongkok maupun arbitrase internasional. Vietnam juga melakukan kerjasama pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas militernya dan memperluas pengaruh diplomatik di kawasan. Langkah-langkah ini mencakup latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan transfer teknologi dengan Amerika Serikat, Jepang, dan India. Meskipun upaya-upaya tersebut dilakukan, konflik maritim antara Vietnam dan Tiongkok tetap belum menemukan solusi. Konflik maritim Tiongkok-Vietnam semakin berlanjut untuk menguasai potensi sumber

daya kelautan dan energi di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Vietnam berkomitmen untuk mempromosikan penyelesaian damai dan mendorong penghormatan terhadap Hukum Laut Internasional dalam menghadapi agresi Tiongkok. Di samping itu, Vietnam menilai langkah Tiongkok yang sangat agresif dan merugikan negaranya maka Vietnam harus mengedepankan upaya-upaya antisipatif yang berupa menjalankan negosiasi, arbitrase, dan kerjasama pertahanan dengan beberapa negara mitra sehingga setiap upaya itu dijalankan untuk mempromosikan penyelesaian damai atas konflik maritim dan mendorong negara-negara lain agar menghormati Hukum Laut Internasional 1982.

5.2. Saran

Adapun sejumlah saran penulis yang dapat diberikan sesuai topik skripsi sebagai berikut.

1. Peneliti berikutnya dapat memakai konsep atau teori yang berbeda dari penulis karena isu konflik maritim Vietnam-Tiongkok atas klaim sepuluh garis putus-putus ini sangat luas penjelasannya sehingga sangat bermanfaat untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat dari penggunaan teori atau konsep dalam kajian hubungan internasional.
2. Peneliti berikutnya dapat menjalankan riset konflik maritim Vietnam-Tiongkok dengan sungguh-sungguh agar memberikan dampak positif terhadap pembaharuan penelitian dari isu konflik maritim Vietnam-Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
3. Peneliti menyarankan agar penulis lainnya dapat meneliti tentang upaya Pemerintah Vietnam untuk membawa isu klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Internasional karena telah merugikan Vietnam di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abba, N. (2022, October 5). Workshop for the Promotion of Sustainable Development of Africa's Deep Seabed Resources (ADSR) in Support of Africa's Blue Economy.
- Adi, D. W. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional. 1(03), 39–51.
- AFP. (2024). China conducts air, sea patrols near Scarborough Shoal | ABS-CBN News. <https://news.abs-cbn.com/world/2024/9/28/china-conducts-air-sea-patrols-near-scarborough-shoal-1226>
- Anh, D. G., Nguyen Nhat. (2018). Deciphering Vietnam's Evolving Military Doctrine in the South China Sea. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/deciphering-vietnams-doctrine-south-china-sea/>
- Anh, T. (2021). Five years after the ruling of PCA: China still ignores ruled based order on the SCS. <https://hanoitimes.vn/five-years-after-the-ruling-of-pca-china-still-ignores-ruled-based-order-on-the-scs-318005.html>
- Ani News. (2020). Coast Guards of India, Vietnam to strengthen bilateral ties. <https://www.aninews.in/news/world/asia/coast-guards-of-india-vietnam-to-strengthen-bilateral-ties20201231025604/>
- Baylon, P. B. A., Adi, O. B., Aiko, L., Silalahi, I. R., Sitanggang, S. H., Al Ghifari, D. N., Susanto, B., Syarifizal, L. M., Afifah, A. N., Sulaiman, Q. T., & Saepudin, E. (2021). Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut Cina Selatan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 691–700. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1986>
- BBC. (2018). Vietnam profile—Timeline. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16568035>

- BBC. (2023). What is the South China Sea dispute? BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>
- BBC. (2024). British colonialism in India. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zx8sf82#zh2gcmn>
- Bureau of OIESA. (2014). China: Maritime Claims in the South China Sea. Office of Ocean and Polar Affairs Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs U.S. Department of State.
- Bureau of Political-Military Affairs. (2023). U.S. Security Cooperation With Vietnam United States Department of State. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-vietnam/>
- Cen, A. (2024). Vietnam expanding landfill work in South China Sea, report says | South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3265972/vietnam-expanding-landfill-work-south-china-sea-report-says>
- Clayman, T. (2023, December 22). China's New Map: The 10-Dash Line. The BPR. <https://www.bostonpoliticalreview.org/post/china-s-new-map-the-10-dash-line>
- CPA. (2024). Territorial Disputes in the South China Sea | Global Conflict Tracker. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>
- Creswell, John. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Darmawan, A. R. (2021). China's Recent Foray into the North Natuna Sea is Problematic. <https://fulcrum.sg/chinas-recent-foray-into-the-north-natuna-sea-is-problematic/>
- Dong, N. (2019). Japanese naval training vessels dock in central Vietnam. <https://e.vnexpress.net/news/news/japanese-naval-training-vessels-dock-in-central-vietnam-3889993.html>

- Drishtiass. (2019). Non-Aligned Movement (NAM). Drishti IAS. <https://www.drishtias.com/to-the-points/Paper2/non-aligned-movement-nam>
- Duong, T. (2018). Newly negotiating COC between ASEAN and China. <https://www.baogiaothong.vn/buoc-tien-moi-dam-phan-coc-giua-asean-va-trung-quoc-192266806.htm>
- Dutton, Peter. A. (2020). Vietnam Threatens China with Litigation over the South China Sea. <https://www.lawfaremedia.org/article/vietnam-threatens-china-litigation-over-south-china-sea>
- EIA. (2024a). China imported record amounts of crude oil in 2023—U.S. Energy Information Administration (EIA). <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61843>
- EIA. (2024b). Regional Analysis Brief: South China Sea. US Department of Energy.
- Elleman, B. (2017). China's Naval Operations in the South China Sea: Evaluating Legal, Strategic and Military Factors. Amsterdam University Press.
- Fatmawati, A., & Aprina, E. (2019). Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Philipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional. *Veritas et Justitia*, 5(1), 105–129. <https://doi.org/10.25123/vej.3289>
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Journal of International Law*, 107(1), 98–123. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098>
- Government of India. (2017). India-Vietnam Relation. India Foreign Affairs Ministry. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Relations_Website__Sept_17_.pdf
- Graham, E. (2013, September 16). China's new map: Just another dash? The Strategist. <https://www.aspistrategist.org.au/chinas-new-map-just-another-dash/>

- Hai, D. T. (2019). Vietnam confronts China in the South China Sea | East Asia Forum. <https://eastasiaforum.org/2019/12/06/vietnam-confronts-china-the-south-china-sea/>
- Hasan, M. M., Jian, H., Alam, M. W., & Chowdhury, K. A. (2019). Protracted maritime boundary disputes and maritime laws. *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping*, 2(2), 89–96.
- Herscovitch, B. (2017, August 28). A Balanced Threat Assessment of China's South China Sea Policy. Cato Institute. <https://www.cato.org/policy-analysis/balanced-threat-assessment-chinas-south-china-sea-policy>
- Hizkia, J., Senewe, E. V. T., & Lengkong, N. L. (2024). Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum*, 13(3), 1–12.
- IISS. (2023). Arming Vietnam: Widened International-security Relations in Support of Military-capability Development. The International Institute for Strategic Studies.
- India Embassy in Vietnam. (2024). Trade & Economic Relations. <https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/economic-and-commercial/>
- India Ministry of Defense. (2016). ASEAN Plus Multinational Field Training Exercise 'Ex Force 18' commences at Pune. <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137194>
- India Ministry of Foreign Affairs. (2016). Action Plan of Implementation The Comprehensive Strategic Partnership Between India-Vietnam in the Period 2017-2020. <https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/VN17B3067.pdf>
- India Ministry of Foreign Affairs. (2021). 2nd India – Vietnam Maritime Security Dialogue. Ministry of External Affairs, Government of India. <https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33772/2nd+India++Vietnam+Maritime+Security+Dialogue+April+06+2021>

- India Times. (2024). ONGC Videsh secures contract extension for Vietnam oil blocks—The Economic Times. <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/ovl-secures-contract-extension-for-vietnam-oil-blocks/articleshow/112626501.cms?from=mdr>
- Indrawan. (2016). Mengenal 9 Garis Putus-putus Tiongkok dan Klaim Laut China Selatan. <https://www.batamnews.co.id/berita-14168-mengenal-9-garis-putusputus-tiongkok-dan-klaim-laut-china-selatan.html>
- Intpreter. (2022). China's nine-dash line proves stranger than fiction | Lowy Institute. <https://www.loyyinstitute.org/the-interpretor/china-s-nine-dash-line-proves-stranger-fiction>
- IPDF. (2022). Countering Nontraditional Security Threats. Indo-Pacific Defense Forum. <https://ipdefenseforum.com/2022/12/countering-nontraditional-security-threats/>
- Jennings, R. (2020). Vietnam Weighs World Court Arbitration Against China if Maritime Diplomacy Fails. https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_vietnam-weighs-world-court-arbitration-against-china-if-maritime-diplomacy-fails/6195002.html
- Kraska, J. (2016). Vietnam Benefits from the South China Sea Arbitration. <https://www.nbr.org/publication/vietnam-benefits-from-the-south-china-sea-arbitration/>
- Kyodo. (2023). Japan, Vietnam agree to deepen security cooperation amid China's rise. <https://english.kyodonews.net/news/2023/11/a5b5238dba0f-japan-vietnam-agree-to-deepen-security-cooperation-amid-chinas-rise.html>
- Ladwig. (2024, September 26). The Indo-Pacific in Indian Foreign Policy. <https://rusi.orghttps://rusi.org>
- Lan, D. M. (2023). Maritime cooperation in the South China Sea: A case study of Japan and Vietnam. 1–26.

- lawnet. (2022). Duties and powers of Vietnam Coast Guard in Hanoi, Vietnam. Tin Tức Pháp Luật. <https://lawnet.vn/thong-tin-phap-luat/en/khac/duties-and-powers-of-vietnam-coast-guard-108160.html>
- Le, H. (2023). Vietnam opposes China's new national map—VnExpress International. <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-opposes-china-s-new-national-map-4648426.html>
- lishuhao, Z. (2020, June 15). Is China Ready for a Second South China Sea Arbitration?. <http://www.scspi.org/en/dtfx/1592210057>
- Mangaluz, J. (2024, February 27). Chinese aircraft spotted over Scarborough Shoal – Coast Guard. Inquirer.net. <https://globalnation.inquirer.net/226565/fwd-china-aircraft-in-scs>
- Maulana, F. R., & Repindowaty, R. (2021). Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(2), 243–2 <https://doi.org/10.22437/up.v1i2.10452>
- Mia, M. R., Tao, J. L., & Anderson, C. D. (2024). The South China Sea Dispute and Regional Response. *Quest Journal of Management and Social Sciences*, 6(1), 74–86. <https://doi.org/10.3126/qjmss.v6i1.66297>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nguyen, H. (2021). Maritime Capacity-building Cooperation between Japan and Vietnam: A Confluence of Strategic Interests. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-148-maritime-capacity-building-cooperation-between-japan-and-vietnam-a-confluence-of-strategic-interests-by-hanh-nguyen/>
- Nikkei Asia. (2024). India and Vietnam to enhance defense cooperation. Nikkei Asia. <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/India-and-Vietnam-to-enhance-defense-cooperation>
- Orr, B. (2024). China conducts patrols in South China Sea amid ongoing run-ins | Reuters. <https://www.reuters.com/world/china/china-conducts-patrols-south-china-sea-amid-ongoing-run-ins-2024-01-03/>

- Panda, A. (2017) . China, ASEAN Come to Agreement on a Framework South China Sea Code of Conduct. <https://thediplomat.com/2017/05/china-asean-come-to-agreement-on-a-framework-south-china-sea-code-of-conduct/>
- Pandit, R. (2013). India kicks offs sub training for Vietnamese navy. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-kicks-offs-sub-training-for-vietnamese-navy/articleshow/26172370.cms>
- Parameswaran, P. (2018). India-Vietnam Defense Ties in the Spotlight With Naval Exercise. <https://thediplomat.com/2018/05/india-vietnam-defense-ties-in-the-spotlight-with-naval-exercise/>
- PKP. (2023). Direct and indirect observation. <https://informationr.net/tdw/publ/ppt/ResMethods/sld007.htm>
- Quang, T. (2018). Adjusting the South China Sea policy after the Arbitral Tribunal's decision. <https://nghiencuuquocte.org/2018/07/08/dieu-chinh-chinh-sach-bien-dong-cua-tq-sau-phan-quyet-cua-toa-trong-tai/>
- Reuters. (2024). China rebuts Vietnam's claims to disputed South China Sea islands. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-rebut-vietnams-claims-disputed-south-china-sea-islands-2024-01-24/>
- RevealInside. (2024, August 25). Chinese Naval Forces Block Filipino Humanitarian Mission Near Hasa-Hasa Shoal. <https://revealinside.in/chinese-naval-forces-block-fil/>
- RFA. (2024). Chinese aircraft carrier Shandong sails near the Philippines. Radio Free Asia. <https://www.rfa.org/english/news/southchinasea/china-aircraft-carrier-philippines-07012024043551.html>
- Schaffer, P. D. (2016). Code of conduct in the South China Sea.
- Solanki, V. (2021). India–Vietnam Defence and Security Cooperation. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 77(2), 219–237. <https://doi.org/10.1177/09749284211004982>

- Thao, H. N. (2017). Vietnam Position in South China Sea. <http://tapchiquptd.vn/vi/bien-dao-viet-nam/lap-truong-cua-viet-nam-trong-giai-quyet-cac-tranh-chap-o-bien-dong/10937.html>
- The Economic Times. (2018). Indian, Vietnamese armies hold first military exercise.
- the paper. (2018). The 40th anniversary of the establishment of the Xisha Zhongjian Island Garrison Force, Deng Xiaoping once awarded the honorary title. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1959194
- Torode, G. (2016). Exclusive: Vietnam moves new rocket launchers into disputed South China Sea—Sources | Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/exclusive-vietnam-moves-new-rocket-launchers-into-disputed-south-china-sea-so-iduskcn10k2o4/>
- Trinh, V. D., & Ho, D. H. (2024). Vietnam's Response to the US Indo-Pacific Strategy in the Context of a Rising China. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1), 120–147. <https://doi.org/10.1177/18681034241237813>
- Tuc, N. H. (2024). Malaysia dan Laut Cina Selatan: Akankah KL Meninggalkan Kebijakan Lindung Nilai? – BCF | Bakrie Center Foundation. <https://bcf.or.id/malaysia-and-the-south-china-sea-will-kl-abandon-its-hedging-policy/>
- UN. (2011). China's Nota Verbale 2011. United Nations. https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_cn_hn_2011_re_phl_e.pdf
- U.S. Embassy & Consulate in Vietnam. (2017). United States Transfers Six Coastal Patrol Boats to Vietnam Coast Guard. <https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/1194701/united-states-transfers-six-coastal-patrol-boats-to-vietnam-coast-guard/>
- Van Quyet, L., & Nguyet, N. T. A. (2023). US-Vietnam maritime security cooperation in the South China Sea: From the Obama administration to the current Biden administration. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2231697.

Vietnam Ministry of Defense. (2023). Foreign Relations and Defence Cooperation. <https://mod.gov.vn/en/intro/vnd/sa-en-dod-frdc/sa-en-dv-mf-ctcs>

Viot. (2023). Celebrating 50 Years of Diplomatic Relations Between Vietnam and Japan. <https://vioit.org.vn/celebrating-50-years-of-diplomatic-relations-between-vietnam-and-japan-5549.4144.html>

VIR, V. I. R.-. (2024, September 9). India-Vietnam march together in progress. Vietnam Investment Review - VIR. <https://vir.com.vn/india-vietnam-march-together-in-progress-114380.html>

VLLF. (2023). Vietnam, Japan strengthen defense cooperation. Vietnamlawmagazine.Vn. <https://vietnamlawmagazine.vn/vietnam-japan-strengthen-defense-cooperation-72313.html>

Wenhui. (2009). The secret of the 1988 March 14 naval battle over the Nansha Islands between China and Vietnam. <http://news.wenweipo.com/2009/04/22/HO0904220048.htm>

Yoshihara, T. (2016). The 1974 Paracels Sea Battle: A Campaign Appraisal. *Naval War College Riview*, 69(02), 41–65.

Zhenhuan, M. (2023). 2023 edition of national map released. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/28/WS64ec91c2a31035260b81ea5b.html>